

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana penting untuk mengomunikasikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Dalam *Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)* No.1 dijelaskan bahwa tujuan utama dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2009) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 1, menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan suatu penyajian posisi dan kinerja keuangan suatu entitas secara terstruktur. Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen harus menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik (auditor) untuk melakukan penilaian terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen agar memberikan hasil yang relevan sehingga mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa dalam laporan keuangan tidak terkandung bias ataupun salah saji material.

Proses audit yang bernilai dan berkualitas sangat diharapkan untuk memenuhi ekspektasi dari perusahaan maupun *stakeholders* sebagai pengguna informasi. Arens (2008) menyebutkan nilai *auditing* sangat bergantung pada persepsi publik atas independensi auditor. Kompetensi orang-orang yang melaksanakan audit akan tidak ada nilainya jika mereka

tidak independen dalam mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan. Namun demikian independensi auditor dimungkinkan untuk terganggu terkait dengan adanya *audit fees* (Ardianingsih, 2013).

Iskak (1999) mendefinisikan *audit fees* sebagai honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 2 Juli 2008 nomor KEP.24/IAPI/VII/2008 mengenai kebijakan penentuan *fee* audit dimana surat tersebut digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia dalam menentukan besarnya imbalan yang wajar atas jasa profesional yang mereka berikan sebagai akuntan publik. Namun, meskipun aturan penetapan besar *audit fees* yang harus dibayarkan perusahaan telah ditetapkan, pada kenyataannya besar *audit fees* yang diberikan perusahaan bervariasi berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau atas dasar tawar menawar antara auditor dengan *auditee*.

Teori keagenan merupakan dasar teori yang diterapkan di dalam praktik bisnis perusahaan. Prinsip dasar dalam teori ini adalah adanya hubungan kerja diantara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang dalam suatu bentuk kontrak kerjasama (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi yang mereka tanamkan, sedangkan di satu sisi manajemen

mengharapkan bonus yang tinggi atas pekerjaan yang mereka lakukan. Konflik keagenan tersebut dapat memicu adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pemilik. Untuk mengatasi masalah agensi yang timbul adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang *baik (Good Corporate Governance)*. *Good corporate governance* menciptakan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan yang dilakukan manajemen sudah sejalan dengan kepentingan dari para *stakeholders*.

Dalam konsep *Corporate governance*, salah satu komponen yang berperan penting adalah komite audit (Yazid et.al, 2014). Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan No.Kep-315/BEJ/06-2000 yang kemudian disempurnakan dengan peraturan No.Kep-339/BEJ/07-2001 pada tanggal 1 Juli 2001 mengenai pembentukan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Hal ini didukung oleh Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee* audit. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pihak eksternal auditor dengan pihak internal auditor termasuk menampung segala masalah yang menyangkut bidang akuntansi, pengawasan internal, dan bidang auditing. Komite audit juga berfungsi

sebagai mediator dalam berkomunikasi antara dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Inti lain dari *corporate governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki tugas untuk mengawasi jalannya strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan, serta menjamin terlaksananya akuntabilitas, (*Egon Zehnder International*, dalam Putri dan Utama, 2014). Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000, telah mengatur mengenai keberadaan komisaris independen. Dikatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam bursa harus mempunyai komisaris independen yang sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh para pemegang saham minoritas. Persyaratan mengenai jumlah minimal komisaris independen adalah 30 persen dari seluruh anggota dewan komisaris.

Selain struktur *governance*, pengendalian internal dalam perusahaan juga penting dalam menentukan besarnya *fee* audit. Pengendalian internal dan *corporate governance* adalah dua hal yang berbeda tetapi keduanya mempunyai hubungan yang berkaitan dalam upaya mewujudkan *good corporate governance*. Selain itu pihak yang terlibat pun berbeda, apabila pengendalian intern lebih berfokus pada tugas dari auditor intern, sedangkan penerapan *good corporate governance* lebih ke strategi yaitu tugas komite audit, tetapi kedua pihak tersebut harus saling bekerjasama (Astuti, dalam Prastuti 2013). *Internal control* menjadi salah satu fokus utama dalam

perusahaan dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian internal dapat dilakukan tidak hanya oleh anggota perusahaan dan tim komite audit saja, tetapi dapat pula dilakukan oleh suatu divisi audit internal. Pihak manajemen dapat membentuk suatu divisi audit internal yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian perusahaan. Internal audit bertugas menjamin agar pengendalian internal dalam perusahaan dapat diterapkan, kemudian internal auditor bertanggungjawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manajemen perusahaan (Astuti, 2010).

Internal audit sangat diperlukan bagi organisasi yang membutuhkan informasi dari pihak yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi guna pengambilan keputusan yang lebih obyektif dan *accountable*. Internal audit mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pihak manajemen perusahaan, sedangkan struktur perusahaan di Indonesia dengan komposisi komisaris dan pemegang saham, maka terdapat peran yang menghubungkan kepentingan para komisaris dan pemegang saham dengan kondisi perusahaan, yaitu peran dari komite audit, karena komite audit ini mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham dan komisaris (Prastuti, 2013)

Menurut Crasswell et al. dalam Halim (2008) ukuran perusahaan (*size*) merupakan besar kecilnya ukuran perusahaan yang sedang diaudit oleh

auditor atau Kantor Akuntan Publik, sedangkan menurut Beams (2000) menyatakan perusahaan yang memiliki jumlah cabang perusahaan yang banyak di dalam negeri maka transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut akan semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi, sedangkan perusahaan yang memiliki cabang perusahaan diluar negeri juga akan memiliki transaksi yang semakin rumit karena perlu membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi*. Setelah membuat laporan *remeasurement* dan atau membuat laporan *translasi* kemudian barulah perusahaan tersebut menyusun laporan konsolidasi. Jumlah cabang perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mempengaruhi besar penetapan *fee* audit eksternalnya (Rina, 2014). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besar kecilnya perusahaan atau dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan besar cenderung memiliki manajemen yang baik dan kinerja perusahaan yang baik. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Namun, semakin besar ukuran perusahaan maka akan mengindikasikan resiko yang semakin tidak terdeteksi.

Dalam proses auditnya, auditor harus memperhitungkan risiko yang terdapat pada perusahaan. Karena dewasa ini perusahaan semakin kompleks, maka tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi – transaksi akuntansi saja. Suatu pendekatan baru bahwa audit harus memperhitungkan risiko, baik risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk menghindari salah saji yang material. Auditor juga

harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam, yaitu mencakup industri klien secara peraturan dan operasinya, hubungan eksternal seperti pemasok, pelanggan, dan kreditor. Auditor juga harus mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor–faktor keberhasilan. Analisis ini membantu auditor mengidentifikasi resiko–resiko yang berkaitan dengan strategi klien, yang mungkin akan mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Semakin tinggi risiko yang terdapat pada perusahaan maka tidak menutup kemungkinan membutuhkan prosedur tambahan audit, sehingga akan mengakibatkan *fee* audit yang lebih besar.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian Prastuti (2013) yang meneliti tentang “Pengaruh Struktur *Governance* dan *Internal Control*, terhadap *Fee* Audit Eksternal” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu resiko keuangan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama 5 periode akuntansi (2010 – 2014), sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 – 2011 sebagai sample penelitian.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti “**Pengaruh Struktur *Governance*, *Internal Control*, dan Resiko Keuangan terhadap *Fee* Audit**”. Motivasi dari penelitian ini adalah karena *fee* audit merupakan salah satu bentuk profesionalisme seorang auditor atas pekerjaan audit yang

dilaksanakannya. Selain ini di Indonesia walaupun telah ada kebijakan mengatur mengenai *fee* audit, namun besarnya *fee* audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *internal control* memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI?
4. Apakah risiko keuangan memiliki pengaruh positif terhadap *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan positif antara komite audit independen dengan *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan positif antara *internal control* dengan *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai hubungan antara risiko keuangan positif dengan *fee* audit dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat dibidang teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh Struktur *Governance*, *Internal Control* dan Resiko Keuangan terhadap *Fee Audit*.

2. Manfaat dibidang praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai bagian struktur *governance* apa yang dapat berpengaruh terhadap *fee* audit dan bagaimana *Internal Control* serta risiko keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mencerminkan risiko audit yang akan dihadapi oleh auditor, sehingga perusahaan dapat mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor yang menentukan besarnya *fee* audit.